



PERIODE 30 JUNI 2023

LAPORAN KEUANGAN

UAPPA DIPA 005.01



**PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA**



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062

Samarinda - Kalimantan Timur 75132

e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 31 Juli 2023

Sekretaris



Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP 19790204 200502 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	48



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur
75132

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 31 Juli 2023

Sekretaris,

Epi Randabunga Rungngu, S.E.
NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.628.000,- dari estimasi Pendapatan sebesar Rp10.734.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp3.017.324.855,- atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.134.752.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.451.638.896,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp39.696.900,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.411.941.996,-, dan Tidak terdapat nilai pada Aset Lainnya.

Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp348.381.613,- dan Rp24.103.257.283,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp6.566.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.539.410.743,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.532.844.743,-). Tidak terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp3.532.844.743,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023

adalah sebesar Rp24.607.036.421,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp3.532.844.743,-) Tidak terdapat koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.029.065.605,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp24.103.257.283,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23		% thd Angg	30-Jun-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10.734.000	5.628.000	0,00	5.420.000
JUMLAH PENDAPATAN		10.734.000	5.628.000	0,00	5.420.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.447.640.000	2.236.682.844	50,29	2.010.785.555
Belanja Barang	B.4	1.682.112.000	780.642.011	46,41	643.268.301
Belanja Modal	B.5	5.000.000	-	0,00	9.900.000
JUMLAH BELANJA		6.134.752.000	3.017.324.855	49,18	2.663.953.856

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	938.000	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	938.000	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	8.758.900	2.564.450
Persediaan yang belum di register	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		40.634.900	2.564.450
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.066.423.831	4.046.573.831
Gedung dan Bangunan	C.16	7.919.067.632	7.919.067.632
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	192.064.950	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.717.078	5.717.078
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.112.862.802)	(4.339.262.401)
Jumlah Aset Tetap		24.869.403.689	24.623.154.090
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	98.890.000	98.890.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(98.890.000)	(98.890.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.910.038.589	24.625.718.540
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	30.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	314.538.613	18.682.119
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang Belum di tagihkan	C.28	3.843.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		348.381.613	18.682.119
JUMLAH KEWAJIBAN		348.381.613	18.682.119
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	21.103.257.283	24.918.956.568
JUMLAH EKUITAS		21.103.257.283	24.918.956.568
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.451.638.896	24.937.638.687

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.566.000	6.358.000
JUMLAH PENDAPATAN		6.566.000	6.358.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2488046778	2.579.738.821
Beban Persediaan	D.3	16.862.025	27.117.800
Beban Barang dan Jasa	D.4	484.520.074	517.666.869
Beban Pemeliharaan	D.5	271.411.749	115.402.483
Beban Perjalanan Dinas	D.6	49.989.273	35.227.909
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	228.580.844	234.345.003
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.539.410.743	3.509.498.885
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.532.844.743)	(3.503.140.885)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.532.844.743)	(3.503.140.885)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPNP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.532.844.743)	(3.503.140.885)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	24.607.036.421	24.918.956.568
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.532.844.743)	(3.503.140.885)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.029.065.605	2.658.533.856
EKUITAS AKHIR	E.5	24.103.257.283	24.074.349.539

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2023 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2023 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan;

5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian

Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2023. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari

entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan 1 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	4.447.640.000	4.447.640.000
Belanja Barang	1.682.112.000	1.682.112.000
Belanja Modal	5.000.000	5.000.000
Jumlah Belanja	6.134.752.000	6.134.752.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp5.628.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp5.628.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp10.734.000,-. Pendapatan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.734.000	5.628.000	-
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	10.734.000	5.628.000	-

Realisasi Pendapatan Jasa pada Semester I TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen dibandingkan pada Semester I TA 2022. Peningkatan terjadi Karena rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terisi full.

Perbandingan Realisasi Pendapatan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.628.000	5.420.000	3,84
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah	5.628.000	5.420.000	3,84

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp3.017.324.855,-*

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.017.324.855,- atau 49 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.134.752.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada
30 Juni 2023*

Uraian	30-Jun-23	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	4.447.640.000	2.236.682.844
Belanja Barang	1.682.112.000	780.642.011
Belanja Modal	5.000.000	-
Total Belanja Kotor	6.134.752.000	3.017.324.855
Pengembalian	-	-
Jumlah	6.134.752.000	3.017.324.855

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,68 persen dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena Meningkatnya Belanja Pegawai yang disebabkan karena adanya mutasi pegawai masuk, penambahan jiwa yang

menjadi tertanggung.

Perbandingan Realisasi Belanja pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.236.682.844	2.010.785.555	11,23
Belanja Barang	780.642.011	643.268.301	21,36
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.017.324.855	2.654.053.856	(13,69)

Belanja Pegawai
Rp2.236.682.844,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.236.682.844,- dan Rp2.010.785.555,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan 1 persen dibandingkan pada 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena Meningkatnya Belanja Pegawai yang disebabkan karena adanya mutasi pegawai masuk, penambahan jiwa yang menjadi tertanggung.

Perbandingan Belanja Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.236.682.844	2.010.785.555	11,23
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.236.682.844	2.010.785.555	11,23
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	2.236.682.844	2.010.785.555	11,23

*Belanja Barang
Rp780.642.011,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp780.642.011,- dan Rp643.268.301,-. Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2023 mengalami peningkatan 21,36 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Belanja barang operasional, Belanja Jasa, dan belanja perjalanan dinas pada semester I 2023.

Perbandingan Belanja Barang pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	435.486.641	405.227.381	7,47
Belanja Barang Non Operasional	5.200.000	0	-
Belanja Jasa	14.254.552	64.320.545	(77,84)
Belanja Pemeliharaan	255.853.070	109.635.566	133,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	49.989.273	35.227.909	-
Belanja Barang Persediaan	19.858.475	28.856.900	(31,18)
Jumlah Belanja Kotor	780.642.011	643.268.301	21,36
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	780.642.011	643.268.301	21,36

*Tidak terdapat Nilai
Belanja Modal*

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat realisasi Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2023 dan pada 30 Juni 2022 terdapat belanja modal sebesar Rp9.900.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar (100) persen. Hal ini disebabkan karena belum terealisasinya Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal pada
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.900.000	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	9.900.000	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	9.900.000	0,00

*Tidak terdapat
belanja Modal
Tanah*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan pada 30 Juni 2022 terdapat nilai sebesar Rp9.900.000,- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 30 Juni 2023 mengalami penurunan (100) persen. Hal ini disebabkan karena pada semester I tahun ini belum realisasi Belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Printer	0	9.900.000	100,00
Router	0	0	0,00
Scanner	0	0	0,00
Laptop	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	9.900.000	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	9.900.000	100,00

*Tidak terdapat
Belanja
Penambahan Nilai
Bangunan*

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan*

B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

*Tidak terdapat
Belanja Modal
Lainnya*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

*Tidak terdapat
Belanja Bantuan
Sosial*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp30.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp30.000.000,- dan tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Jenis	30 Juni TA 2023	31 Des TA 2022
1.	Uang Tunai di brankas	26.352.000	0
2.	UP yang belum dipertanggung jawabkan	3.648.000	0
	Jumlah	30.000.000	0

*Tidak Terdapat Kas
di Bendahara
Penerimaan*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tidak Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp938.000,-

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp938.000,- dan tidak terdapat nilai piutang PNBP per 31 Desember 2022. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarida yang menjadi Piutang adalah sewa Rumah Dinas.

Tidak Terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tidak Terdapat Bagian Lancar TPA

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Tidak terdapat saldo
Belanja Dibayar di
Muka*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tidak terdapat
Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp8.758.900,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.758.900,- dan Rp2.564.450,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31

Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	30-Jun-23	31-Des-22
Barang Konsumsi	8.758.900	2.564.450
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	8.758.900	2.564.450

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dengan berita acara stok opname fisik persediaan nomor: W6-TUN3/774/PL.07/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

*Tidak Terdapat
Tagihan TP/TGR*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat Nilai
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp16.798.993.000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp16.798.993.000,-. Tidak terdapat perubahan Nilai Tanah dari tahun 2022.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	16.798.993.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2022	16.798.993.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 30 Juni 2023

No.	Luas (m ²)	Lokasi	KIB	Nilai
1.	3000 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	11.750.550.000
2.	700 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	1.888.933.000
3.	400 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	1.078.250.000
4.	800 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	2.081.260.000
Jumlah				16.798.993.000

Keseluruhan tanah berada di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang kelurahan Baqa, dimana peruntukan tanah seluas 3000 m2 digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sedangkan yang lainnya digunakan untuk tempat tinggal atau rumah

dinas. Tanah – tanah tersebut telah bersertifikat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI pada tanggal 29 Oktober 2014, sebelumnya keseluruhan sertifikat nama an Kementrian/Lembaga (Kementrian Kehakiman).

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp4.066.423.831,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp4.066.423.831,- dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.046.573.831,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.046.573.831
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0
Transfer Masuk	19.850.000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2023	4.066.423.831
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(3.406.576.381)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	659.847.450

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp7.919.067.632,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.919.067.632,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.919.067.632
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2023	7.919.067.632
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(1.132.537.558)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	6.786.530.074

Tidak terdapat transaksi penambahan Gedung dan Bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp192.064.950,-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp192.064.950,-.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	192.064.950
Mutasi tambah:	
- Penambahan Nilai Jaringan	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2023	192.064.950
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(31.210.556)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	160.854.394

*Aset Tetap Lainnya
Rp5.717.078,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.717.078,-.

Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.717.078
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2023	5.717.078
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	5.717.078

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat
Konstruksi Dalam
Pengerjaan*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.570.324.495,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp4.570.324.495,- dan Rp4.339.262.401,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 30 Juni 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.066.423.831	3.406.576.381	659.847.450
2	Gedung dan Bangunan	7.919.067.632	1.132.537.558	6.786.530.074
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.064.950	31.210.556	160.854.394
4	Aset Tetap Lainnya	5.717.078	0	5.717.078
Akumulasi Penyusutan		12.183.273.491	4.570.324.495	7.612.948.996

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp98.890.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp98.890.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa *software Komputer* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	98.890.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	98.890.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	(98.890.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan kurang.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 30 Juni 2023

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	98.890.000
Jumlah	98.890.000

C.22 Aset Lain-Lain

Tidak Terdapat Aset
Lain-Lain

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp98.890.000,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak terdapat perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp98.890.000,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	98.890.000	98.890.000	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	98.890.000	98.890.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Saldo Uang Muka
dari KPPN
Rp30.000.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp30.000.000,- dan tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp314.538.613,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 adalah Rp314.538.613,- dan Nilai Utang Pihak Ketiga pada 31 Desember 2022

adalah sebesar Rp18.682.119,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Tidak terdapat
Saldo Pendapatan
Diterima di Muka*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Utang yang belum
di tagihkan
Rp3.834.000,-*

C.27 Utang yang Belum di Tagihkan

Saldo Utang yang Belum di Tagihkan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.834.000,- dan tidak terdapat Utang yang belum di tagihkan per 31 Desember 2022.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

*Ekuitas
Rp24.103.257.283,-*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.103.257.283,- dan Rp24.607.036.421,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp6.566.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing – masing adalah sebesar Rp6.566.000,- dan Rp6.358.000,- . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.566.000	6.358.000	3
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	6.566.000	6.358.000	3

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan dari Kegiatan Operasional Perkantoran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan adalah pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp2.488.046.778,-

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.488.046.778,- dan Rp2.579.738.821,- .Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

Uraian	30-Jun-23	30-Jun-22	Naik/Turun	%
Beban Gaji Pokok PNS	793.574.980	833.771.180	-40.196.200	-4,82
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.625	11.732	-107	-0,91
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	46.694.440	48.579.520	-1.885.080	-3,88
Beban Tunj. Anak PNS	14.928.288	16.597.134	-1.668.846	-10,06
Beban Tunj. Struktural PNS	25.920.000	24.300.000	1.620.000	6,67
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.225.795.000	1.260.420.000	-34.625.000	-2,75
Beban Tunj. PPh PNS	168.905.285	176.957.421	-8.052.136	-4,55
Beban Tunj. Beras PNS	39.686.160	43.958.940	-4.272.780	-9,72
Beban Uang Makan PNS	80.596.000	83.393.000	-2.797.000	-3,35
Beban Tunjangan Umum PNS	8.235.000	8.420.000	-185.000	-2,20
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	83.700.000	83.700.000	0	0,00
Pengembalian Beban Belanja tunj. Umum PNS	0	-370.000	370.000	-100,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-106	106	-100,00
Total Beban Pegawai	2.488.046.778	2.579.738.821	-91.692.043	-3,55

Beban Persediaan

Rp16.862.025,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.862.025,- dan Rp27.117.800,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	16.862.025	27.117.800	-37,82
Jumlah	16.862.025	27.117.800	-37,82

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp484.520.074,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp484.520.074,- dan Rp517.666.869,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	434.299.480	430.550.627	0,87
Beban Pengiriman Surat Dianas Pos Pusat	3.092.000	3.739.550	(17,32)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28.165.000	16.830.000	67,35
Beban Barang Operasional Lainnya	150.000	2.377.000	(93,69)
Beban Barang Operasional - Penanganan COVID 19	0	1.883.400	100,00
Beban Non Operasional	5.200.000	53.739.250	(90,32)
Beban Langganan Telepon	144.448	179.886	(19,70)
Beban Langganan Air	2.370.496	2.014.809	17,65
Beban Sewa	11.098.650	2.378.347	100,00
Beban Jasa - Penangan COVID 19	0	3.974.000	100,00
Jumlah	484.520.074	517.666.869	(6,40)

*Beban Pemeliharaan
Rp271.411.749,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp271.411.749,- dan Rp115.402.483,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.635.152	25.305.995	475,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.572.593	63.226.488	(29,50)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81.204.004	26.870.000	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0,00
Jumlah	271.411.749	115.402.483	135,19

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp35.227.909,-*

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp35.227.909,- dan tidak terdapat beban pada 30 Juni 2022.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi koordinasi dan konsultasi yang meningkat terkait kekosongan jabatan Sekretaris. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	35.227.909	0	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	100,00
Jumlah	35.227.909	0	100,00

*Tidak terdapat Beban
Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat Beban
Bantuan Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp234.345.003,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp234.345.003,- dan Rp213.970.204,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	138.451.633	118.076.834	17,26
Beban Penyusutan gedung dan Bangunan	93.492.558	93.492.558	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	2.400.812	2.400.812	0,00
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	234.345.003	213.970.204	9,52

*Tidak terdapat Beban
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

*Tidak terdapat
Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Tidak terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2023 dan pada 30 Juni 2022 sebesar Rp437.342,-. Adapun Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pada Tahun anggaran 2023 perhitungan persediaan telah menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), sehingga tidak terdapat surplus/deficit dari kegiatan non operasional.

*Tidak terdapat Pos
Luar Biasa*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp24.918.956.568,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.918.956.568,- dan Rp25.106.440.923,-.

Defisit LO

(Rp3.503.140.885,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing – masing adalah sebesar (Rp3.503.140.885,-) dan (Rp2.720.025.816,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Tidak terdapat

Penyesuaian Nilai

Aset

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 30 Juni 2022. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat

Koreksi Nilai

Persediaan

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

Tidak Terdapat

Selisih Revaluasi Aset

Tetap

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

Tidak terdapat Koreksi **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.

Tidak terdapat Koreksi Lain-Lain

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan sedangkan pada 30 Juni 2022. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp2.658.533.856,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.658.533.856,- dan Rp2.539.463.981,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.420.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.663.953.856
Jumlah	2.658.533.856

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp5.420.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp2.663.953.856,-.

Ekuitas Akhir Rp24.074.349.539,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.074.349.539,- dan Rp24.925.862.188,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2023, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP). Dalam peralihan tersebut, maka diperlukan berbagai langkah persiapan agar proses peralihan tersebut berjalan dengan lancar salah satunya adalah proses migrasi data saldo awal. Migrasi saldo awal adalah proses mengambil saldo Neraca, BMN, dan Persediaan serta referensi persediaan dari Aplikasi E-Rekon&LK menjadi saldo awal TA 2023 dan referensi persediaan pada Aplikasi SAKTI milik masing-masing Satuan Kerja.

PTUN Samarinda mengalami kendala dalam hal migrasi dimana terdapat anomaly data.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, maka semua rekening pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menampung dana APBN telah di restrukturisasi dari Rekening Giro menjadi Virtual Account. Adapun data rekening yang dikelola pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah:

1. Rekening Virtual 653245598571000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-

2732/WPB.12/KP.06/2022 tanggal 16 Oktober 2022. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01.

2. Rekening Virtual 651555598581000 atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Persetujuan Pembukaan S-1829/WPB.12/KP.06/2022 tanggal 08 Juli 2022. Digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

F.2.3 Revisi DIPA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum ada melakukan revisi anggaran pada semester I 2023.

F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 63/PA/SK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/56/KU.01/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan. SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/55/KU.01/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna

Anggaran Nomor: W2.TUN5/57/KU.01/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengelola Sakpa/SAI. Pada Bulan April 2023 terdapat perubahan pada SK penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Staf Pengelola Keuangan dan Pengelola Belanja Pegawai yaitu Nomor : W2-TUN5/358/KU.01/IV/2023 tanggal 1 April 2023.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
Pengadilan Ta	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
Usaha Negara	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
Samarinda	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rahmat Hidayat, S.T.

KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2022	Per 30-06-2022
A Tanah					
1	Tanah	-	16.798.993.000	-	16.798.993.000
	Jumlah		16.798.993.000	-	16.798.993.000
B Peralatan dan Mesin					
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.150.449.441	636.806.581	513.642.860
2	Alat Kantor	5	472.049.525	457.915.125	14.134.400
3	Alat Rumah Tangga	5	1.197.701.895	1.127.125.895	70.576.000
4	Alat Komunikasi	5	10.400.000	7.496.000	2.904.000
5	Komputer Unit	4	760.372.300	640.769.750	119.602.550
6	Peralatan Komputer	4	261.099.690	227.573.043	33.526.647
8	Peralatan Pemancar	4	21.950.000	21.950.000	-
9	Alat Studio	5	74.712.000	21.983.200	52.728.800
	Jumlah		3.948.734.851	3.141.619.594	807.115.257
C Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.249.518.000	683.362.406	5.566.155.594
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.319.970.000	226.537.780	1.093.432.220
3	Tugu/Tanda Batas	50	320.135.000	34.934.090	285.200.910
	Jumlah		7.889.623.000	944.834.276	6.944.788.724
D JARINGAN					
1	JARINGAN LISTRIK	50	192.064.950	26.408.932	165.656.018
	Jumlah		192.064.950	26.408.932	165.656.018
E ASET TETAP LAINNYA					
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		5.717.078	0	5.717.078
	Jumlah		5.717.078	0	5.717.078
F SOFTWARE					
1	Aset Tak Berwujud		98.890.000	98.890.000	-
	Jumlah		98.890.000	98.890.000	0
Total			28.934.022.879	4.211.752.802	24.722.270.077

*Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
 PER 30 JUNI 2022

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
Jumlah				Rp	-	Rp	-